



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah yang belum menetapkan RPJMD dapat menggunakan dokumen perencanaan lainnya sebagai pedoman penyusunan RKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR
KINERJA PROGRAM PROVINSI BANTEN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Pasal 2

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan maksud dijadikan sebagai:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 2018; dan
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. penetapan indikator kinerja pembangunan daerah;
 - b. isu-isu strategis Provinsi;
 - c. prioritas; dan
 - d. program perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan pedoman perencanaan daerah sementara untuk mengisi kekosongan terhadap indikator kinerja program pada perangkat daerah yang akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Agustus 2017

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROVINSI BANTEN

1. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2018

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
11	01		Pendidikan			793,254,200,000
11	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			40,708,300,000
				1 Nilai IKM (Satuan: %)	3.00	
11	01	15	Program Pendidikan Menengah			742,750,000,000
				1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	72.90	
				2 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	64.86	
				3 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	58.77	
				4 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai)	56.98	
				5 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.22	
				6 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.44	
				7 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.64	
				8 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.89	
				9 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	51.96	
				10 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	55.50	
				11 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	48.68	
				12 Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	96.21	
				13 Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	17.00	
				14 Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	54.63	
11	01	16	Program Pendidikan Khusus			9,795,900,000
				1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	17.00	
11	02		Kesehatan			412,970,000,000
11	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			205,850,000,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
11	02	15	Program Upaya Peningkatan Kesehatan			175,440,000,000
				1 Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	65.00	
				2 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100.00	
				3 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	55.00	

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
				4 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	75.00	
11	02	16	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan			31,680,000,000
				1 Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	10.00	
				2 Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis (Satuan: %)	3.00	
				3 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	65.00	
				4 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	20.00	
				5 Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	32.00	
				6 Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	6.40	
				7 Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang)	70.00	
				8 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	70.00	
				9 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	50.00	
				10 Capaian sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit (Satuan: %)	35.00	
				11 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Banten (Satuan: %)	35.00	
				12 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	60.00	
				13 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Banten (Satuan: %)	65.00	
				14 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	0.00	
				15 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	60.00	
11	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1,501,615,200,000
11	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			64,100,500,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
11	03	15	Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur			1,433,685,700,000
				1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	87.43	
				2 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km)	87.43	
				3 Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	20.89	
				4 Jumlah tampungan/sumber air yang dapat dimanfaatkan (Satuan: buah)	10.00	
				5 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	15,332.98	
				6 Presentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	54.55	
				7 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46.21	
				8 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	0.00	
11	03	16	Program Penataan Ruang			3,829,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
				1 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen)	0.00	
11	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			184,986,500,000
11	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			8,986,500,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
11	04	15	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman			176,000,000,000
				1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit)	84.02	
				2 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	0.00	
				3 Cakupan Pelayanan Air minum layak (Satuan: %)	71.05	
				4 Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %)	67.94	
				5 cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha)	0.00	
				6 Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung)	0.00	
11	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			65,449,500,000
11	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			19,343,300,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
11	05	15	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum			16,499,600,000
				1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	75.00	
				2 cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100.00	
				3 Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100.00	
				4 Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100.00	
11	05	16	Program Penanggulangan Bencana			16,499,600,000
				1 Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100.00	
				2 Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100.00	
				3 Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)	100.00	
11	05	17	Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik			13,107,000,000
				1 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	0.00	
				2 Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	0.00	
				3 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	0.00	
				4 Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100.00	
				5 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00	
11	06		Sosial			18,692,000,000
11	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			7,352,300,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
11	06	15	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial			11,339,700,000
				1 Cakupan PMKS Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan (Satuan: Jumlah KK)	2,570.00	
				2 Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial yang meningkat kesejahtraannya (Satuan: jumlah)	2,460.00	
				3 Cakupan PMKS yang dikembangkan yang meningkat kesejahtraannya (Satuan: Jumlah)	461.00	
				4 Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah)	396.00	
				5 Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS terintegrasi yang termanfaatkan (Satuan: Jumlah dokumen)	6.00	
				6 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah)	2,685.00	
				7 Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang)	49,623.00	
				8 Cakupan PSKS yang meningkat fungsi sosialnya (Satuan: Jumlah)	3,805.00	
12			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
12	01		Ketenaga Kerjaan			49,651,400,000
12	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			19,877,200,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
				2 Capaian Perencanaan Tenaga Kerja (Satuan: %)	8.14	
12	01	15	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja			29,774,200,000
				1 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.35	
				2 Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	3.66	
				3 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2.98	
				4 Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	12.97	
				5 Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10.00	
				6 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9.51	
				7 Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1.25	
12	02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			10,751,600,000
12	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			3,132,500,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
12	02	15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7,619,100,000
				1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	60.00	
				2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50.00	
				3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	
				4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	75.00	
				5 Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	85.00	

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
			6	Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	85.00
			7	Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	60.00
12	03			Pangan	
					12,868,300,000
12	03	01		Program Tata Kelola Pemerintahan	3,226,900,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
12	03	15		Program Ketahanan Pangan	9,641,400,000
			1	Ketersediaan pangan (Satuan: %)	95.10
			2	Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	82.50
			3	Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	90.00
12	05			Lingkungan Hidup	
					29,061,100,000
12	05	01		Program Tata Kelola Pemerintahan	15,918,800,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
12	05	15		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	13,142,300,000
			1	Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	52.00
			2	Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	59.00
			3	Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar)	8,000.00
			4	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	52.00
12	06			Administrasi Kependudukan dan Capil	
					880,000,000
12	06	15		Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	880,000,000
			1	Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	64.86
			2	Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	23.33
			3	Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	85.76
			4	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	79.19
			5	Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	85.00
12	07			Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					12,669,000,000
12	07	01		Program Tata Kelola Pemerintahan	3,132,500,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
12	07	15		Program Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	9,536,500,000
			1	Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)	20.00
			2	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %)	20.00
			3	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %)	20.00
			4	Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %)	2.00
12	08			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					2,467,400,000
12	08	15		Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	2,467,400,000

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
				1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.33	
				2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	60.90	
				3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %)	10.26	
				4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.53	
12	09		Perhubungan			53,304,300,000
12	09	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			12,824,300,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
12	09	15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan			40,480,000,000
				1 Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi)	100.00	
				2 Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10.00	
				3 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	10.00	
				4 Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100.00	
				5 Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	20.00	
				6 Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0.00	
				7 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0.00	
				8 Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	0.00	
12	10		Komunikasi dan Informatika			21,589,800,000
12	10	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			6,210,600,000
				1 capaian nilai IKM (Satuan: Nilai)	2.80	
12	10	15	Program Pengembangan, Pemanfaatan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik			15,379,200,000
				1 Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	30.26	
				2 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	20.00	

Kode		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
12	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			26,763,900,000
12	11	01 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	9,861,600,000
12	11	15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	1 Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	1.00	10,141,400,000
12	11	16 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi	1 Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah)	110.00	6,760,900,000
			2 Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	5.00	
12	12	Penanaman Modal			19,802,400,000
12	12	01 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	8,064,800,000
12	12	15 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun)	15.00	11,737,600,000
			2 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100.00	
			3 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	17.03	
			4 Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100.00	
			5 Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: Rp. Tryliun)	43.00	
12	13	Kepemudaan dan Olahraga			23,509,800,000
12	13	01 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	3,994,800,000
12	13	15 Program Pengembangan Olah Raga dan Pemberdayaan Kepemudaan	1 Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi)	75.00	19,515,000,000
			2 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	75.00	
			3 Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	70.00	
			4 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	75.00	
12	14	Statistik			2,464,000,000
12	14	01 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	50.00	2,464,000,000
12	15	Persandian			1,157,600,000
12	15	15 Program Tata Kelola Persandian	1 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %)	20.00	1,157,600,000

Kode		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
12	16	Kebudayaan			8,268,300,000
12	16	15	Program Pelestarian Kebudayaan		8,268,300,000
			1	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	85.00
			2	Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	85.00
			3	Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	85.00
			4	Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	85.00
			5	Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	85.00
			6	Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	85.00
			7	Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	85.00
12	17	Perpustakaan			13,413,300,000
12	17	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		6,504,200,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
12	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		6,909,100,000
			1	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	75.00
			2	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	85.00
12	18	Kearsipan			3,250,800,000
12	18	15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan		3,250,800,000
			1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	80.00
			2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	80.00
			3	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	85.00
20		Urusan Pilihan			
20	01	Kelautan dan Perikanan			29,753,200,000
20	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		7,472,000,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
20	01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut		22,281,200,000
			1	Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8.01
			2	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100.00
			3	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %)	116.00
20	02	Pariwisata			18,918,400,000
20	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		5,276,000,000
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
20	02	15	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			13,642,400,000
				1 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,920,000	
				2 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.69	
				3 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3.12	
				4 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	1.00	
20	03		Pertanian			38,609,800,000
20	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			15,053,000,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
20	03	15	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan Peternakan			23,556,800,000
				1 Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,471,936.25	
				2 Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	19,425.00	
				3 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	735.00	
				4 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	48,345.15	
				5 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	85.00	
				6 Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100.00	
				7 Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %)	100.00	
				8 Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %)	100.00	
				9 Persentase Ketersediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %)	100.00	
				10 Persentase Ternak Lahir Hidup (Satuan: %)	50.00	
				11 Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman dan Hortikultura (Satuan: %)	5.00	
				12 Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	21,578.55	
				13 Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7,141.05	
				14 Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)	3,343.20	
				15 Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	3,022.95	
				16 Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton)	35.17	
20	04		Kehutanan			7,744,000,000
20	04	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan			7,744,000,000
				1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	5,000.00	
				2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	10.00	

Kode		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
20	05	Energi dan Sumberdaya Mineral			28,661,500,000
20	05	01 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	5,452,700,000
20	05	15 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara			4,805,600,000
			1 Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	65.00	
			2 Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	41.10	
20	05	16 Program Pengembangan, Pengelolaan, Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan			18,403,200,000
			1 Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: SS)	15,000.00	
20	06	Perdagangan			107,910,700,000
20	06	15 Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen			107,910,700,000
			1 Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0.00	
			2 Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	1,000.00	
			3 Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	10.00	
			4 Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100.00	
			5 capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	5.00	
			6 Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	108.00	
20	07	Perindustrian			12,444,200,000
20	07	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			7,270,200,000
			1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
20	07	15 Program Peningkatan Daya Saing Industri			5,174,000,000
			1 Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	20.00	
			2 Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	20.00	
			3 Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	20.00	
			4 Persentase Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: %)	20.00	
30		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
30	01	Administrasi Pemerintahan			290,260,200,000
30	01	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			290,260,200,000
			1 Persentase OPD yang memiliki nilai LAKIP B (Satuan: %)	30.00	
			2 Nilai IKM (Satuan: skala)	2.80	
			3 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	100.00	

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
				4 Persentase Lembaga Keuangan yang memberikan Fasilitas Pinjaman bagi Masyarakat (Satuan: %)	100.00	
				5 cakupan rekening kredit per penduduk dewasa yang disalurkan oleh kantor bank umum konvensional di prov banten (Satuan: %)	100.00	
				6 Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	17.27	
				7 Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100.00	
				8 Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	100.00	
				9 Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	100.00	
				10 Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	100.00	
				11 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	100.00	
				12 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	100.00	
				13 Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	90.00	
				14 Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	100.00	
				15 Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	100.00	
				16 Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	100.00	
				17 Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	100.00	
				18 Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	100.00	
				19 Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	100.00	
				20 Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	100.00	
				21 Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD (Satuan: %)	100.00	
30	02		Pengawasan			20,951,400,000
30	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			8,478,600,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
30	02	15	Program Pengawasan Pembangunan			12,472,800,000
				1 Cakupan pengawasan dan Tindak Lanjut LHP (%) bidang Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan (Satuan: %)	100.00	
				2 Cakupan pengawasan dan Tindak Lanjut LHP (%) bidang Modal dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	100.00	
				3 Cakupan pengawasan dan Tindak Lanjut LHP (%) pada Pengelolaan Belanja barang dan jasa, Hibah, Bansos dan bantuan keuangan (Satuan: %)	100.00	
				4 Cakupan pengawasan dan Tindak Lanjut LHP (%) pada Perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian kepegawaian daerah (Satuan: %)	100.00	
				5 Cakupan Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	100.00	
				6 Cakupan Pembinaan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kab/Kota (Satuan: %)	100.00	
				7 Rasio profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan (Satuan: %)	100.00	
30	03		Perencanaan			33,281,500,000

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
30	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			13,715,700,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
30	03	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			19,565,800,000
				1 Persentase konsistensi Dokumen RPJMD dengan Renstra OPD (Satuan: %)	100.00	
				2 Persentase konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPd (Satuan: %)	70.00	
				3 Persentase konsistensi Renstra OPD dengan Renja OPD (Satuan: %)	70.00	
				4 Persentase konsistensi RKPd dengan Renja OPD (Satuan: %)	70.00	
				5 Persentase konsistensi RKPd dengan KUA-PPAS (Satuan: %)	70.00	
				6 Persentase konsistensi KUA-PPAS dengan RAPBD (Satuan: %)	70.00	
				7 Persentase konsistensi RAPBD dengan APBD (Satuan: %)	70.00	
				8 Persentase masukan masyarakat yang sudah diverifikasi yang diakomodir dalam RKPd (Satuan: %)	50.00	
				9 Persentase realisasi target RPJMD Tahunan (Satuan: %)	70.00	
				10 Presentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Dengan RTRW (Satuan: %)	70.00	
30	04		Keuangan			81,276,000,000
30	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			6,689,500,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
30	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			43,141,000,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
30	04	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah			17,764,400,000
				1 Persentase Potensi Tunggal Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	14.20	
				2 Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	57.01	
				3 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	42.99	
30	04	16	Program Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah			13,681,100,000
				1 Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	100.00	
				2 Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	100.00	
				3 capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100.00	
30	05		Kepegawaian			12,190,200,000
30	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			3,132,500,000
				1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	
30	05	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah			9,057,700,000
				1 Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	85.00	
				2 Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	85.00	

Kode			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
				3	Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	85.00
				4	Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	85.00
30	06		Pendidikan dan Pelatihan			44,180,600,000
30	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan			21,230,500,000
				1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80
30	06	15	Program Pengembangan SDM Aparatur			22,950,100,000
				1	Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	80.00
				2	Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	100.00
				3	Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	80.00
				4	Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	80.00
30	07		Penelitian dan Pengembangan			4,977,900,000
30	07	15	Program Penelitian dan Pengembangan			4,977,900,000
				1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	50.00
				2	Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	50.00

NO	ASPEK	FOKUS	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
		Fokus Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH) (Satuan: Tahun) Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH) Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH) ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
			Pendidikan	Harapan lama sekolah (Satuan: thn) Rata rata lama sekolah (Satuan: thn)
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang (Satuan: Dokumen)

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010